PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terutama sumber-sumber air permukaan, perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pengendaliannya, sehingga ketersediaan air dapat tetap mendukung dan mampu memenuhi berbagai kepentingan sesuai perkembangan pembangunan;
- b. bahwa upaya pengawasan dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu didukung oleh semua pihak terutama para pemanfaat air baik perorangan, badan hukum maupun badan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991](#) tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999](#) tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999](#) tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 203);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
19. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor I Seri C);
20. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995](#) tentang Garis Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 2 Seri C);
21. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997](#) tentang Pembangunan Dipinggir Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor I A Seri C);

22. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
23. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
24. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
25. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
26. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.
6. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di perairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah yang sudah ada di perairan umum.

8. Pengambilan Air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
9. Pemanfaatan Air adalah digunakannya sejumlah air untuk suatu kegiatan tertentu dengan tidak mengurangi jumlah volume air tersebut.
10. Izin Pengambilan Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
11. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air selanjutnya disebut SIPPA adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB II

ASAS PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air berdasarkan asas kemanfaatan umum, kesinambungan dan kelestarian.
- (2) Hak atas air adalah hak guna air.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin dan Bentuk Izin

Pasal 3

- (1) Setiap pengambilan air permukaan untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPPA dari Gubernur yang untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIPPA diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) SIPPA dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum, badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) SIPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) SIPPA diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan.
- (2) SIPPA ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (3) SIPPA tidak termasuk dalam izin pembangunan/pembuatan bangunan pengambilan air di sumber air.

Pasal 5

Pengambilan air yang tidak memerlukan SIPPA adalah :

- a. pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan Pertanian subsistens serta untuk keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.
- b. pengambilan air permukaan untuk kebutuhan rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPPA sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Permohonan SIPPA harus dilampiri dengan :
 - a. peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1000 dan peta situasi skala 1 : 10.000;
 - b. izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c. proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait dan masyarakat setempat;
 - d. gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang telah mendapat persetujuan Dinas;
 - e. dokumen lingkungan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya.
- (3) Setelah permohonan SIPPA diterima secara lengkap dengan persyaratan yang sudah ditentukan pada Ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari meminta pertimbangan Instansi terkait, dan paling lambat 20 hari Kepala Instansi terkait menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Dinas.